

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dinamika globalisasi yang semakin kompleks tentunya berdampak terhadap hilangnya batas-batas kedaulatan negara. Negara-negara dunia semakin berlomba-lomba untuk membangun kekuatan dan kapasitas ekonomi-perdagangannya, termasuk bagi negara-negara di wilayah Asia, termasuk Cina.

CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Area*) merupakan kerangka kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Cina. Kerjasama ini ditandatangani di Pnom Pehn, Kamboja pada 4 November 2002. Tujuannya adalah untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas pada 1 Januari 2010.¹ Bagi Cina, CAFTA memiliki peranan penting untuk mendukung kemajuan perekonomiannya yang ditopang oleh pilar industri dan investasi asingnya.

Menurut *Asia Time* Cina menganggap bahwa kawasan Asia Tenggara memiliki peranan penting, setidaknya menyangkut tiga hal, yaitu:²

- a. Perluasan dan target pangsa pasar produk-produk industri.

¹ "Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China". ASEAN., <http://www.aseansec.org/asean-anthem/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2013.

² I Wibowo, *Perdagangan Cina-ASEAN : Tantangan Atau Ancaman*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.19.

Wilayah Asia Tenggara memiliki jumlah penduduk yang relatif besar. Keberadaannya menjadi pangsa pasar yang potensial bahkan wilayah Asia Tenggara seperti wilayah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya memiliki gaya hidup yang relatif konsumtif.

b. Potensi sumber daya manusia dan bahan baku.

Sebagian besar negara-negara ASEAN merupakan kelompok negara dunia ketiga yang berperan penting sebagai penghasil bahan mentah dan energi. Sampai dengan tahun 2010 negara-negara Asia Tenggara masih memosisikan diri sebagai negara pensuplai, belum menjadi negara pengolah.

c. Pemantapan hegemoni sosial-ekonomi dan industri Cina di dunia.

Pada tahun 2010 Cina telah menjadi negara industri baru dengan produk-produk yang dapat diterima oleh negara-negara Asia Tenggara. Secara tidak langsung ini akan membangun sebuah ketergantungan berupa ikatan-ikatan emosional antara masyarakat negara-negara Asia Tenggara dengan produk-produk Cina.

Sedangkan bagi negara-negara ASEAN, keberadaan Cina memiliki arti penting yaitu sebagai media dalam perluasan kerjasama *Government to Government* (G to G) dan juga sebagai potensi negara investor dan substitusi ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap negara-negara barat. Perkembangan perekonomian Cina pada periode tahun 2000-2007 memang mengalami tingkat progresifitas yang luar biasa. Periode tahun 2000-2007, telah berhasil menjadikan Cina sebagai negara adikuasa baru di Asia, bahkan di dunia. Tingkat PDB (Produk

Domestik Bruto) Cina sebagai indikator kemajuan suatu negara dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat, sebagai gambaran pada tahun 1980 tingkat PDB Cina hanya sebesar 460.906 US Dollar dan pada awal tahun 2005 sebesar 18.308.500 US Dollar.³

Keberadaan sektor perindustrian memang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Cina. Hal ini dikarenakan pada periode tahun 2000-2007 total pendapatan negara dihasilkan dari sektor industri sebesar 48,9 persen, ini merupakan jumlah yang besar apabila dibandingkan dengan sektor agrikultur yang hanya menyumbang sekitar 11,7 persen ataupun sektor pelayanan jasa yang hanya menyumbang sekitar 39.3 persen.⁴

Salah satu sektor industri yang menjadi pilar perekonomian Cina adalah tekstil. Sejak dekade 1960-an, Cina memang telah memposisikan diri sebagai salah satu eksportir terbesar bagi komoditas tekstil internasional dan ini terus berlangsung sampai dengan akhir tahun 2008. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

³ “China-ASEAN Main Trade Centre”, <http://en.chinaaseantrade.com/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2013.

⁴ *Ibid.*

Tabel 1.1.
Negara Eksportir Kain Terbesar di Dunia
Tahun 2006-2010

No.	Negara	Volume Perdagangan (Milyar US Dollar)
1.	Uni Eropa	80,2
2.	Cina	65,3
3.	Amerika Serikat	12,5
4.	Korea Selatan	10,4
5.	India	10,3
6.	Turki	9,4
7.	Taiwan	9,2
8.	Jepang	7,3
9.	Pakistan	7,2
10.	Uni Emirat Arab	5,8
11.	Indonesia	3,7

Sumber : "Leading of Exportir and Importir of Textile Comodity",
<http://www.wto.org>., diakses pada tanggal 14 Juli 2013.

Keberadaan hegemoni perekonomian dan perdagangan Cina yang begitu besar kemudian dihadapkan pada perdagangan Indonesia, khususnya pada komoditas tekstil. Sejak lama Cina telah memposisikan diri sebagai produsen tekstil dengan harga yang sangat murah dengan kapasitas produksi yang besar, hal ini tentunya akan berdampak serius bagi perdagangan tekstil di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ade Sudrajat Usman yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang menyatakan bahwa :”pangsa pasar tekstil dalam negeri akan terus

tergerus oleh tekstil dari Cina, namun kita tidak boleh saling menyalahkan karena yang terpenting adalah bagaimana pemecahan permasalahan dari CAFTA”.⁵

Keberadaan ekspor-impor komoditas tekstil antara Cina dan Indonesia memang menjadi hal yang menarik. Hal ini disebabkan karena dua hal, yaitu :⁶

- a. Indonesia dan Cina sama-sama negara yang memiliki produk tekstil dalam skala yang relatif besar sebagai komoditas unggulan, namun pada prinsipnya masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.
- b. Indonesia dan Cina sama-sama memiliki pangsa pasar yang terbuka terhadap komoditas tekstil karena masing-masing negara memiliki jumlah penduduk yang besar sebagai *market share*.

Perkembangan ekspor-impor tekstil Indonesia dan Cina juga mengalami dinamika yang menarik. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. sebagai berikut :

⁵ “ACFTA Terus Tekan Industri Tekstil dan Mainan”, *Kompas*, 8 Mei 2010.

⁶ “Dilema Perdagangan Tekstil Cina : Pengusaha Optimis Meskipun Mengalami Penurunan Omset”, *Tempo*, Edisi Februari 2010, hal.18.

Tabel 1.2.
Neraca Ekspor Tekstil Indonesia ke Cina
Tahun 2005-2011

No.	Tahun	Total Nilai Ekspor (Kilogram)
1.	2005	37.170.647
2.	2006	38.775.723
3.	2007	43.480.189
4.	2008	42.146.604
5.	2009	43.171.366
6.	2010	39.810.041
7.	2011	37.366.290

Sumber : Data Primer, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011

Melalui uraian di atas maka dapat diketahui bahwa ekspor tekstil Indonesia ke Cina dari tahun 2005 hingga 2007 cenderung menunjukkan peningkatan, namun menjelang tahun 2008 ke 2009 nilai ekspor cenderung stagnan dan akhirnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011. Penurunan yang begitu drastis pada tahun 2009 sampai 2011 ini dapat menjadi bukti yang sangat nyata bahwa agenda CAFTA memberikan pengaruh negatif yang besar dalam ekspor tekstil Indonesia ke Cina.

Kemudian selain ekspor tekstil ke Cina, Indonesia juga menjalankan impor tekstil dari Cina. Harga yang murah dan ketersediaan stok yang melimpah menjadi salah satu alasan mengapa para pemangku kepentingan perdagangan menjalankan impor tekstil dari Cina, selain dengan India dan beberapa negara lainnya:

Tabel 1.3.
Neraca Impor Tekstil Indonesia Dari Cina
Tahun 2005-2011

No.	Tahun	Total Nilai Impor (Kilogram)
1.	2005	45.620.000
2.	2006	46.113.000
3.	2007	46.480.000
4.	2008	48.125.000
5.	2009	51.783.000
6.	2010	53.088.000
7.	2011	54.790.000

Sumber : Data Primer, Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2011

Tabel di atas memberikan fakta bahwa berbeda dengan ekspor tekstil Indonesia ke Cina, perkembangan nilai impor justru dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari angka tahun 2005 sebesar 45 juta kilogram menjadi 54 juta kilogram pada tahun 2011, bahkan angka impor tekstil dari Cina ke Indonesia belum pernah sekalipun mengalami penurunan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Cina mampu memanfaatkan momentum CAFTA untuk meningkatkan kapasitas perdagangan luar negerinya, khususnya komoditas tekstil ke Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Melalui latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah :

“Apa kebijakan-kebijakan perdagangan baik domestik maupun internasional yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menyingkapi CAFTA di sektor tekstil pada tahun 2005-2012 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan menganalisis dampak CAFTA bagi Indonesia terutama dari sektor tekstil.
- Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan perdagangan Indonesia dalam menyikapi CAFTA di sektor tekstil.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan secara umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kebijakan perdagangan Indonesia di sektor tekstil dalam menyikapi

CAFTA.

- Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi siapa saja yang akan melakukan riset tentang CAFTA.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai perdagangan bebas sebenarnya telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan akademisi, namun yang menekankan pada efektivitasnya ternyata masih belum banyak yang meneliti. Dengan kata lain perdagangan bebas, khususnya dalam konteks regional menjadi sebuah kajian yang kurang berkembang jika dibandingkan bidang-bidang lainnya pada khasanah Ilmu Hubungan Internasional.

Salah satu tulisan mengenai perdagangan tekstil Cina dalam dinamika CAFTA dikemukakan oleh Gail Taylor yang berjudul “Journal of Marketing and Management : China Textil Trade” yang menyatakan bahwa tekstil bukan sekedar komoditas, namun tekstil telah menjadi kebutuhan pokok dan trendsetter bagi perdagangan internasional. Apabila suatu negara dapat menguasai komoditas ini, maka ini akan sangat menentukan kemajuan suatu negara.⁷

Gail Taylor juga menyatakan bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas, negara-negara yang memfokuskan diri terhadap industri tekstil pada akhirnya akan dapat memiliki penetrasi perdagangan tekstil yang besar seperti Cina dan India.

⁷ Gail Taylor, “Journal of Marketing and Management : China Textil Trade”, *The Jorunal of International Trade*, Edisi III, Emerald Publishing, Hongkong, 2004, hal.9.

Namun demi meningkatkan industry tekstil suatu negara pada saat ini yang dapat dilakukan adalah memodifikasi produk-produk tekstilnya atau ikut mainstream perdagangan dari kedua negara ini.⁸

Tulisan selanjutnya mengenai perdagangan bebas dikemukakan oleh Chong Li Coy yang menyatakan bahwa kebijakan atau strategi yang dipakai ASEAN baik dalam peningkatan kerjasama internal maupun eksternal. ASEAN dipandang sebagai institusi regional yang berorientasi pada pembangunan. Strategi pembangunan disini adalah strategi dalam hubungan internasional dengan asumsi dasar bahwa negara yang memiliki *power* akan mampu mengendalikan sumber-sumber daya untuk pembangunan. Strategi ini disebut oleh Chong Li Choy, sebagai strategi *Open Self-Reliant Regionalism*, yaitu:

“..The strategy of open-reliant regionalism is an international strategy for maximizing the resources available for developmental purposes for specific-less developed region, such as ASEAN, in order to increase the developmental potentials of the less developed countries in the regional grouping. This achieved through the manipulation of internasional power via the eight systemic and asystemic balancing cooperations. These balancing operations seek to minimize the power disadvantages of the less developed countries concern in relation to other countries, and hance, maximize their power in the international arena, enabling them to have access to and control over more development resources. The cost reduction operation in useful in helping to preserve internal stability within these countries so that these countries may act cohesively in the international arena. It is important to note that these varied operations have to be attempted within the framework of a single coherent strategy, so as to undermine one another. The goal of this strategy is, of course, the promotion of development in less developed countries, particularly ASEAN countries.”⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Choy, Cong Li. *Open Self-Reliance regionalism: Power for ASEAN's Development*, Institute of Southeast Asian Studies, Bangkok, 1991, hal-45.

Li Choy juga menyatakan bahwa perdagangan regionalisme merupakan gabungan bangsa-bangsa dalam region yang sama. Tentunya dengan koalisi ini akan menumbuhkan:

- a. Peningkatan *asystemic power* ASEAN dalam berhubungan dengan negara lain, karena masing-masing elemen dari atribut *asystemic* keenam negara anggota digabung jadi satu dalam wadah koalisi. Bahkan juga sebagai elemen penyeimbang dalam berhubungan dengan kekuatan-kekuatan besar di *region* ini.
- b. Koalisi memungkinkan untuk bertindak sebagai aktor tunggal dalam berhubungan dengan bangsa lain. Dengan begitu memberikan posisi monopoli dalam arena hubungan internasional, karena ASEAN memiliki kekuatan atas sumber daya alam yang melimpah.
- c. Koalisi juga memberikan dampak bagi munculnya status *giving*, karena memunculkan hubungan kepentingan timbal balik dan kebersamaan antar pemerintah. Dan dengan demikian akan menguatkan nilai kebersamaan atau identitas sebagai bangsa ASEAN.

Tulisan selanjutnya dikemukakan Marian Latuperisa dalam tulisannya yang berjudul “Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Impor Tekstil India” yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersama-sama dengan pamangku kepentingan (stakeholder) nantinya akan dapat menangani gempuran tekstil dari India

selama pemerintah Indonesia dapat memberikan berbagai stimulus, antara lain subsidi, promosi dan lain-lainnya.¹⁰

Menanggapi tulisan-tulisan di atas penulis dapat mengkritisi bahwa dalam menghadapi CAFTA pemerintah Indonesia harus mengedepankan tindakan-tindakan inovatif demi menyelamatkan industri tekstil dalam negeri. Paparan tulisan di atas menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih berorientasi pada acuan kebijakan yang masih bersifat tradisional, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan masalah di atas penulis menggunakan pendekatan yang paling relevan, yaitu teori perdagangan, yang di dalamnya terdapat struktur kekuatan perdagangan, rezim perdagangan regional dan kebijakan perdagangan. Teori ini dipilih karena mampu menjabarkan secara mendasar mengenai kebijakan perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menyingkapi CAFTA di sektor tekstil pada tahun 2005-2012.

Agenda perdagangan bebas CAFTA menjadi persoalan yang dilematis yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Meskipun agenda ini telah direncanakan sejak lama (4 November 2002), namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia

¹⁰ Marian Latuperisa, "Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Impor Tekstil India" Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

belum siap dalam menghadapi CAFTA. Untuk itulah pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta ataupun individu.¹¹

Dengan ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah, menunjukkan adanya suatu kepentingan negara yang ingin dicapai. Pada dasarnya kebijakan suatu negara adalah untuk mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut. Pada umumnya kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut diambil suatu tindakan yang disebut kebijakan atau *policy*. Kebijakan dalam negeri menekankan pada hubungan dan kepentingan pemerintah dengan rakyatnya.

Jika dikaitkan dengan konsep kebijakan di atas maka ini dapat diaplikasikan pada kebijakan perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menyingkapi CAFTA di sektor tekstil pada tahun 2005-2012, dimana keberadaan pemerintah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), sekaligus pembuat keputusan harus menjalankan berbagai tindakan yang sistematis, seksama dan terencana karena pada prinsipnya CAFTA akan memberikan pengaruh yang sangat

¹¹ BN. Marbun, *Kamus Politik Edisi Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal.265.

besar bagi eksistensi perdagangan domestik dan internasional Indonesia, karena secara konseptual CAFTA akan sangat mengurangi intervensi / campur-tangan negara pada bidang perdagangan dengan Cina maupun negara ASEAN.

Kemudian jika dikaitkan dengan konsep kebijakan di atas maka tidak dapat dipungkiri bahwa esensi kebijakan adalah tentang bagaimana pemerintah dapat mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional, dengan memposisikan masyarakat sebagai instrumen (subyek) dari kebijakan. Artinya pemerintah harus melibatkan masyarakat (pelaku usaha), sehingga dengan ini mereka dapat lebih bersaing dalam konstelasi perdagangan regional dan internasional.

Teori struktur kekuatan perdagangan merupakan pendekatan yang mengacu pada sistem globalisasi dunia yang sangat terkait dengan hegemoni perekonomian dunia. Teori ini juga membahas tentang kondisi struktur kekuatan dunia pasca Perang Dingin yang semakin mengedepankan sistem pasar (*Marked Oriented System*), yang kemudian terindikasikan menuju arah liberalisme-kapitalisme.¹² Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan dibawah ini :

“Economic reasoning often ascribe to markets a spontaneity of origin and a determinism in operations that originate from economic necessity... Yet if markets are viewed as creatures of social and political systems, then their operations, given certain economic parameters and technical constrains, can be understood as being induced or suppressed through political decisions and institutional mechanism, both at the national and international level.”¹³

¹² Susan Strange, *States and Markets : Power in the World Economy*, Pinter Publisher London, 1988, hal.23-42.

¹³ *Ibid.*

Struktur kekuatan perekonomian negara-negara dunia dalam menghadapi pasar bebas memiliki empat elemen yaitu :

a. Struktur keamanan (*The Security Structure*)

Struktur keamanan dunia cenderung mengalami perubahan yang semula disiapkan hanya untuk sengketa perang terbuka, menjadi sebuah ancaman non-fisik. Hal inilah yang menimbulkan posisi tawar (*bargain positions*) negara-negara maju menjadi semakin besar atas negara-negara berkembang, khususnya pada beberapa kasus seperti proliferasi nuklir, isu embargo persenjataan dan aspek-aspek lainnya.

b. Struktur produksi (*The Production Structure*)

Pada umumnya negara-negara yang mengedepankan sistem produksi masal pada saat ini banyak yang menjadi raksasa ekonomi. Perkembangan produksi yang sangat pesat membuat banyak negara maju dunia mengembangkan sistem dunia melalui perusahaan transnasional (MNC, *multinational corporations*), sehingga kenyataan ini berdampak pada posisi tawar negara-negara industri yang semakin besar terhadap negara-negara berkembang.

Jika dikaitkan dengan kebijakan perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menyingkapi CAFTA di sektor tekstil bahwa negara dengan produksi masal, seperti halnya Cina pada komoditas tekstil akan menjadi ancaman secara sementara. Pada akhirnya hanya produk-produk berkualitas-lah dengan harga yang kompetitif yang memiliki 'potential demand', sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia menilai penting untuk memberikan

prioritas dan dukungan dari sektor hulu hingga ke hilir demi menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

c. Struktur finansial/permodalan (*The Financial Structure*)

Pada masa lalu sektor permodalan ditunjukkan oleh mekanisme kepemilikan logam mulia (merkantilisme), dengan berkembangnya masa, logam mulia kemudian digantikan oleh sistem kapitalisme. Kenyataan inilah yang membuat posisi tawar negara-negara berkembang menjadi lemah karena ketergantungan permodalan melalui pinjaman dari bank dunia, IMF dan negara pendonor lainnya. Dalam kasus kebijakan perdagangan ini pemerintah Indonesia dituntut untuk dapat memberikan berbagai kemudahan peminjaman modal untuk para pengusaha tekstil di Indonesia, termasuk mendukung birokrasi yang lebih mudah diakses dan bunga yang lebih ringan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk menambah modal mereka.

d. Struktur ilmu pengetahuan (*The Knowledge Structure*).

Struktur ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh banyak negara maju untuk dapat merubah pola kehidupan manusia di seluruh dunia, sehingga negara-negara maju tersebut dapat menjadi kiblat bagi perkembangan negara-negara berkembang.

Jika dikaitkan dengan kebijakan perdagangan yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam menyingkapi CAFTA di sektor tekstil adalah kurang *update*-nya pengetahuan para pengusaha maupun pengrajin tekstil Indonesia mengenai berbagai hal baik teknis maupun non-teknis demi menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing di pasar internasional.

Kemudian menurut Smith kemajuan perdagangan regional suatu negara ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu :¹⁴

- a. Tersedianya sumber daya manusia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup.
- b. Pertambahan persediaan barang yang mencakup sumber daya, bahan baku dan investasi.
- c. Perluasan pasar yang didukung oleh kebijakan yang koherens dengan lingkungan domestik ataupun global yang didukung oleh inovasi yang dijalankan secara terus-menerus.

Dari ketiga unsur tersebut dapat didefinisikan bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup menjadi sesuatu yang abstrak karena sifat dan karakteristiknya yang dinamis, sumber daya yang sifatnya tetap akan dapat membangun suatu kondisi yang statis sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia tidak akan maju tanpa peran serta dari luar seperti alih teknologi yang mengharuskan suatu bangsa berinteraksi dengan bangsa lain.

¹⁴ Adam Smith Dalam Gilarso. *Pembangunan Nasional*. BPEE Sanata Dharma. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 1992. h 27

Dalam pertambahan persediaan barang dapat diartikan bahwa tidak ada satu negarapun yang sanggup memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, karena pada dasarnya sumber daya terbatas namun kepentingan negara/manusia tidak terbatas sehingga interaksi yang sepadan diantara negara-negara melalui bentuk-bentuk kerjasama menjadi solusi yang efektif dalam rangka merealisasikan kepentingan nasional.

Perluasan pasar yang terus menerus bagi negara merupakan strategi yang efektif dalam rangka memperoleh profit yang maksimal dari negara lain, sehingga sampai kapanpun konsep ini akan tetap relevan seiring dengan meningkatnya standar hidup dunia dan semakin terbatasnya sumber daya dunia.

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel yang ada, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban pokok masalah yang ada.

b. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari data resmi pemerintah Indonesia maupun ASEAN serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, Koran, diktat kuliah, serta sumber elektronik seperti e-book dan website.

c. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melakukan documentary research dan internet research yang kemudian diidentifikasi ide-ide serta gagasan yang ada dalam berbagai literatur laporan penelitian dan dokumen untuk kemudian digunakan dalam merangkai argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian.

d. Teknik analisa data

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teori sebagai acuan dalam menginterpretasikan data-data yang ada. Data-data atau fakta yang dikumpulkan akan disaring dan disesuaikan dengan indikator-indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang ada dalam teori yang digunakan. Selanjutnya data-data tersebut diagresikan dan digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum terhadap masalah yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan / Rencana Penelitian

Dalam menganalisa data, penulis membuat sub-sub judul yang dapat menjawab pokok permasalahan diatas, dengan menggunakan kerangka pemikiran dasar sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, perumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang CAFTA dan dampaknya terhadap kondisi perdagangan antara Indonesia dan Cina di sektor tekstil.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai kebijakan perdagangan Indonesia yang kemudian di bandingkan dengan kebijakan perdagangan yang dilakukan Cina.

Bab IV merupakan kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya.